



## **Analisis Kebijakan Program Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.**

### ***Policy Analysis of The Community Palm Oil Rejuvenation Program Through The Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) in South Labuhanbatu***

**Jannes Maringan Siahaan<sup>1)</sup>, Tumpal H.S. Siregar<sup>2)</sup>, Elisabeth Siahaan<sup>3)</sup>**

1) Magister Agribisnis, Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Dosen Magister Agribisnis, Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

3) Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan program peremajaan sawit rakyat melalui badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Data yang dianalisis diperoleh dari lokasi penelitian yakni di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melakukan wawancara terstruktur kepada 165 petani yang mengajukan permohonan untuk memperoleh dana bantuan. Kebijakan program peremajaan ini mempunyai persyaratan yang terdiri dari aspek administrasi dan aspek pembiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa nilai dana bantuan yang diberikan pemerintah dalam melaksanakan peremajaan sawit belum dapat mendukung biaya yang dibutuhkan. Persentase petani yang memiliki luas lahan 2 ha sebesar 78,8% sedangkan yang memiliki luas lahan 4 ha sebesar 21,2%, usia petani yang produktif sebanyak 68% sedangkan 32% usia yang tidak produktif. Petani yang memiliki legalitas lahan sebanyak 36% dan yang belum legal sebanyak 64%. Kebijakan ini belum spesifik terhadap lokasi terbukti dari data 282 petani yang tergabung dalam Gapoktan terdapat 16% belum dapat memanfaatkan kebijakan tersebut. Biaya yang dibutuhkan petani dari awal penanaman sampai pada masa pemeliharaan tahun ke-3 senilai Rp 60.364.349,-. Melalui biaya indikatif yang ditetapkan pemerintah senilai Rp 66.437.000, maka selisih nilai rata-rata biaya kebutuhan petani lebih kecil dari yang ditetapkan pemerintah yaitu senilai Rp 6.072.651,- atau 9,14%. Berdasarkan dana bantuan pemerintah Rp 25.000.000,-/ha/petani maka untuk memenuhi biaya peremajaan sawit, petani memerlukan dana pendamping dengan nilai rata-rata sebesar Rp35.364.349/ha/petani atau 59% dari total dana.

**Kata kunci :** analisis, kebijakan, peremajaan, kelapa sawit, dana pemerintah, petani

#### **Abstract**

*his study aims to analyze the policies of the community oil palm rejuvenation program through the oil palm plantation fund management agency (BPDPKS) in South Labuhanbatu Regency. The data analyzed were obtained from the research location in Aek Raso Village, Torgamba Subdistrict, South Labuhanbatu Regency by conducting structured interviews with 165 farmers who applied for aid. This rejuvenation program policy has requirements consisting of administrative aspects and financing aspects. Research shows that the value of aid funds provided by the government in implementing oil palm rejuvenation has not been able to support the costs required. The percentage of farmers who have 2 ha of land area is 78.8% while those who have 4 ha of land area are 21.2%, the age of productive farmers is 68% while 32% of age is not productive. Farmers who have a legality of land as much as 36% and who are not legal as much as 64%. This policy has not been specific to the location proven from the data of 282 farmers who are members of the Gapoktan, there are 16% have not been able to take advantage of the policy. Costs needed by farmers from the beginning of planting until the maintenance period of the 3rd year is Rp. 60,364,349. Through indicative costs set by the government of Rp. 66,437,000, the difference in average value of farmers' needs is less than that set by the government, which is valued at Rp. 6,072,651, or 9.14%. Based on government funding of Rp. 25,000,000, - / ha / farmer then to meet the cost of rejuvenation of oil palm, farmers need matching funds with an average value of Rp35,364,349 / ha / farmer or 59% of the total funds.*

**Keywords:** analysis, policy, rejuvenation, oil palm, government funds, farmers

**How to Cite:** Siahaan, J.M., T. H. S. Siregar, & E. Siahaan. (2020). Analisis Kebijakan Program Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 2(2) 2020: 139-147,



## **PENDAHULUAN**

Dalam upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit (Undang-Undang Perkebunan No.39, 2014): Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah; Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan. Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.

Implementasinya, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 jo Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Menteri Keuangan diberikan tanggungjawab untuk membentuk sebuah badan pengelola dana usaha perkebunan yang bersumber dari selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya dikenal dengan nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), (Perpres No.61, 2015). Peraturan tersebut, selain menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana dan tepat sasaran, juga menjadi landasan pemberian bantuan dana untuk peremajaan kelapa sawit.

Indonesia memiliki potensi perkebunan kelapa sawit hingga mencapai 11,26 juta hektar, dengan jumlah kebun milik petani 4.751.321 hektar dan dari luasan tersebut terdapat 2.409.103 hektar harus diremajakan dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki luas perkebunan kelapa sawit rakyat 42.839 hektar, dengan potensi luas kebun yang akan diremajakan seluas 15.700 hektar yang tersebar di 5 kecamatan. Setelah berumur 25 tahun maka tanaman kelapa sawit perlu diremajakan. Selain itu, peremajaan juga dilakukan terhadap tanaman yang menggunakan benih tidak unggul (*illegitim*) meskipun belum memasuki umur 25 tahun, tanaman tersebut berpotensi dengan produksi kurang dari 10 ton/ha/tahun (Dirjenbun Republik Indonesia, 2017).

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan badan pengelola dana perkebunan yang didirikan untuk melakukan penghimpunan dana dalam mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit. Salah satu penggunaan dari dana yang dihimpun tersebut adalah Program bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dana penghimpunan perkebunan sawit rakyat dilakukan dengan memberikan insentif agar terjadi proses peremajaan (*re-planting*) perkebunan sawit rakyat.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengalokasikan dana sebesar Rp 25.000.000,-/hektar dengan luasan maksimal kebun yang dibiayai adalah 4 hektar/petani dengan memenuhi ketentuan aspek administrasi, meliputi usia produktif petani, luasan lahan petani, legalitas lahan petani, alamat/tempat tinggal petani, sedangkan aspek pembiayaan meliputi seluruh kebutuhan petani dalam upah tenaga kerja, infrastruktur dan bahan/alat), aspek pembiayaan tersebut difungsikan dalam Rencana Kebutuhan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS). Berdasarkan uraian diatas beberapa masalah yang perlu diketahui dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat tersebut ialah bagaimana ketentuan persyaratan kebijakan program peremajaan sawit rakyat ditinjau dari aspek administrasi dan aspek Pembiayaan dan apakah dana bantuan pemerintah tersebut dapat memenuhi kebutuhan

dana peremajaan sawit rakyat khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba. Sehingga tujuan dari penelitiannya adalah Menganalisis kriteria petani yang memenuhi aspek administrasi dan aspek pembiayaan. Menganalisis kebutuhan dana peremajaan sawit petani terhadap dana bantuan pemerintah

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara yaitu pada Gapoktan Aek Raso Maju Bersama. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai instrument yang merupakan gambaran data kriteria petani yang memenuhi aspek administrasi serta aspek jumlah pembiayaan dana peremajaan kelapa sawit yang dibutuhkan petani.

Sampel penelitian adalah seluruh petani (165 orang petani kelapa sawit) yang akan menerima manfaat dari program peremajaan sawit BPDPKS. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara terstruktur dilapangan dengan pengurus dan petani menggunakan daftar kuesioner dan pertanyaan. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan terkait dengan aspek administrasi maupun aspek pembiayaan dan memiliki daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (Silalahi, 2009).

Data primer yang diperoleh dari petani yaitu data administrasi meliputi usia petani, alamat, legalitas lahan, luas lahan serta aspek kebutuhan pembiayaan peremajaan kelapa sawit. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah seperti BPS Labuhanbatu, Dinas Perkebunan terkait peraturan pemerintah, disamping itu juga diperoleh keadaan umum/potensi aktual mengenai kondisi Gapoktan dan keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian diolah ke dalam bentuk tabulasi kemudian dihitung secara matematis, khusus untuk aspek administrasi dilanjutkan dengan analisis deskriptif untuk membandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPDPKS, sedangkan data yang meliputi aspek pembiayaan dilakukan dengan menganalisis dan mengklasifikasikan data biaya peremajaan sawit yang dibutuhkan oleh petani dan dibandingkan dengan standar baku yang ditetapkan oleh BPDPKS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lokasi Gapoktan Aek Raso Maju Bersama beralamat di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas penduduk adalah petani dengan jumlah penduduk laki-laki 2.169 jiwa dan perempuan 2.210 jiwa.

Dari 237 orang petani yang beralamat di dalam kabupaten, maka 165 petani (69,62%) mengajukan diri untuk mengikuti program peremajaan sawit, 38 petani (16,03%) sudah melakukan peremajaan sawit dengan dana pribadi dan sebanyak 34 petani (14,35%) belum tertarik atau ragu-ragu untuk mengikutinya. Berdasarkan hasil

wawancara terhadap petani yang telah mendapatkan sosialisasi tersebut maka, peneliti menetapkan jumlah populasi yang akan diuji sebanyak 165 orang.

Tabel 1 Jumlah Petani dalam Gapoktan sesuai kriteria alamat petani.

Alamat	Jumlah Petani (orang)	Luas Lahan (ha)	Persentase Petani (%)	Jumlah Luas Lahan (%)
Luar Kabupaten	45	180	15,96	27,52
Dalam Kabupaten	237	474	84,04	72,48

Sumber : Data Primer (diolah), 2018

Tabel 2 Persentase Alamat/tempat tinggal Petani

No	Alamat	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Desa Aek Raso	Dalam Daerah	160	97
2.	Desa lainnya	Dalam Daerah	5	3

Sumber: Data Primer (diolah),2018

Dari tabel 2 terlihat bahwa jumlah petani yang bertempat tinggal di Desa Aek Raso sebanyak 97% dan 3% tinggal di desa yang berbeda namun masih berada dalam daerah kabupaten yang sama.

Tabel 3 Jumlah Petani Produktif dan Tidak Produktif

No	Batas Usia (tahun)	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	15 - 55	Produktif	113	68
2.	56 - 75	Tidak Produktif	52	32

Sumber : Data Primer (diolah), 2018

Dari data diperoleh usia produktif petani (15-55tahun) di Gapoktan Aek Raso Maju Bersama sebanyak 68% dan yang tidak produktif terdapat 32%.

Tabel 4 Persentase Luas Lahan Petani

No	Luas Lahan (ha)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	2	130	79
2.	4	35	21

Sumber : Data Primer (diolah), 2018

Jumlah petani yang memiliki luas lahan 2 hektar sebanyak 130 (78,8%) dan 35 petani (21,2%) memiliki luas lahan 4 hektar. Dari kondisi tersebut maka masih terdapat luas perkebunan di Desa Aek Raso yang berpotensi untuk diremajakan seluas 2.746 hektar (88,3%) dan khusus untuk Gapoktan Aek Raso Maju Bersama terdapat luas kebun yang tidak terpenuhi melalui kebijakan PSR seluas 254 hektar (38,84%).

Tabel 5 Persentase Legalitas Lahan Petani

No	Legalitas Lahan (ha)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	SHM	60	36
2.	Belum SHM	105	64

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan kepemilikan atas legalitas lahan petani diperoleh bahwa 36,4 % petani telah memiliki SHM dan masih terdapat 63,6% petani yang belum memiliki SHM.

Tabel 6 Resume hasil analisis aspek administrasi

No	Aspek Administrasi	Ketentuan BPDPKS	Hasil Analisa		Keterangan
			Jumlah Petani	(%)	
1.	Alamat Petani	berada di daerah lokasi	237	72,48	Masalah
2.	Usia	minimal 17 tahun	113	68	Tidak masalah
3.	Luas lahan	Maksimal 4 ha	165	100	Tidak Masalah
4.	Legalitas lahan	SHM	60	36	Masalah

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh bahwa aspek administrasi yang meliputi alamat petani dan legalitas lahan menjadi masalah sehingga terdapat beberapa petani yang tidak dapat memperoleh bantuan pemerintah senilai Rp 25.000.000,- akibat tidak memenuhi ketentuan kebijakan program PSR melalui BPDPKS

### Aspek Pembiayaan Upah Tenaga Kerja

Tabel 7. Upah Tenaga Kerja dari Penanaman Awal sampai dengan pemeliharaan tahun ke-3 di Gapoktan Aek Raso Maju Bersama

No	Upah Tenaga Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	Penanaman awal (P0)	9.875.000,-	28,00
2	Perawatan tahun 1(P1)	9.090.000,-	25,78
3	Perawatan tahun 2(P2)	8.960.000,-	25,41
4	Perawatan tahun 3(P3)	7.340.000,-	20,81
<b>Jumlah</b>		35.265.000,-	

Sumber: Data primer (diolah), 2018

Tabel 8. Biaya Infrastruktur (Perawatan Jalan Produksi) dari awal P0-P3 di Gapoktan Aek Raso Maju Bersama

No	Biaya Infrastruktur	Jumlah	Persentase (%)
1	Penanaman awal (P0)	1.000.000,-	22,2
2	Perawatan tahun 1(P1)	1.000.000,-	22,2
3	Perawatan tahun 2(P2)	1.000.000,-	22,2
4	Perawatan tahun 3(P3)	1.500.000,-	33,4
<b>Jumlah</b>		4.500.000,-	

Sumber: Data primer (diolah), 2018

Berdasarkan data, biaya infrastruktur yang dibutuhkan para petani untuk mendukung peremajaan sawit di lokasi perkebunan sampai dengan pemeliharaan tahun ke 3 (P3) adalah Rp 4.500.000. Besarnya nilai kebutuhan biaya perawatan pada saat tahun ke-3 senilai 33,4% dari total biaya sementara pada saat penanaman hingga perawatan tahun ke-2 biaya yang dibutuhkan adalah tetap senilai 22,2%. Nilai kebutuhan ini didasari karena sebelumnya telah terbentuk jalan-jalan produksi yang digunakan sehingga tidak membutuhkan biaya tinggi.

Tabel 9. Rincian Biaya Bahan dan Alat dari P0-P3 di Gapoktan Aek Raso Maju Bersama

No	Bahan dan Alat	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
<b>A. Penanaman Awal (P0)</b>			
1	Bibit Sawit dan Biaya Transport	4.900.000,-	76,26
2	Bibit kacang dan tanam	1.125.000,-	17,51
3	Pemupukan perdana Urea 0,2 Kg/Pok (140 Pok)	131.600,-	2,05
4	Pemupukan perdana MOP 0,2 Kg/Pok. (140 Pok)	134.400,-	2,09
5	Pemupukan perdana TSP 0,2 Kg/Pok. (140 Pok)	134.400,-	2,09
<b>Jumlah</b>		<b>6.425.400,-</b>	
<b>B. Pemeliharaan tanaman 1 tahun (P1)</b>			
1	Pemupukan dengan Urea 2 Kg/Pok/Thn (140 Pok)	1.316.000,-	34,32
2	Pemupukan dengan MOP 2Kg/Pok/Thn (140 Pok)	1.344.000,-	35,05
3	Pemupukan dengan TSP 1,5Kg/Pok/Thn (140 Pok)	1.008.000,-	26,28
4	Pemupukan dengan Dolomit 1 Kg/Pk/Thn (140)	140.000,-	3,65
5	Pemupukan dengan Borak 0,02 Kg/Pok/thn(140)	27.000,-	0,7
<b>Jumlah</b>		<b>3.835.000,-</b>	
<b>C. Pemeliharaan tanaman 2 tahun (P2)</b>			
1	Pemupukan dengan Urea 3 Kg/Pok/Thn (140 Pok)	1.974.000,-	37,18
2	Pemupukan dengan MOP 3 Kg/Pok/Thn (140 Pok)	2.016.000,-	37,97
3	Pemupukan dengan TSP 2 Kg/Pok/Thn (140 Pok)	1.152.000,-	21,70
4	Pemupukan dengan Dolomit 1 Kg/Pk/Thn (140)	140.000,-	2,64
5	Pemupukan dengan Borak 0,02 Kg/Pok/thn(140)	27.000,-	0,51
<b>Jumlah</b>		<b>5.309.000,-</b>	
<b>D. Pemeliharaan tanaman 3 tahun (P3)</b>			
1	Pemupukan dengan Urea 3 Kg/Pok/Thn (140 Pok)	1.974.000,-	37,18

2	Pemupukan dengan MOP 3 Kg/Pok/Thn (140 Pok)	2.016.000,-	37,97
3	Pemupukan dengan TSP 2 Kg/Pok/Thn (140 Pok)	1.152.000,-	21,70
4	Pemupukan dengan Dolomit 1 Kg/Pk/Thn (140)	140.000,-	2,64
5	Pemupukan dengan Borak 0,02 Kg/Pok/thn(140)	27.000,-	0,51
<b>Jumlah</b>		<b>5.309.000,-</b>	

Sumber : Data primer diolah.

Dari jenis bahan dan alat yang dibutuhkan Gapoktan mengalokasikan biaya seperti terlihat pada Tabel 9. Untuk memenuhi keperluan pembelian bahan dan alat dari awal penanaman sampai pada tahap pemeliharaan tanaman sampai 3 tahun dibutuhkan biaya sebesar Rp 20.878.400,-

Kebutuhan biaya bahan dan alat selama proses penanaman (P0) sampai dengan perawatan tanaman hingga tahap pemeliharaan tahun ke-3 diperoleh bahwa biaya bahan dan alat tertinggi yang dibutuhkan adalah pada tahap penanaman awal yakni sebesar 30,78%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10 Biaya Bahan dan Alat dari penanaman awal sampai dengan pemeliharaan tahun ke-3 di Gapoktan Aek Raso Maju Bersama

No	Biaya bahan dan alat	Jumlah	Persentase (%)
1	Penanaman awal (P0)	6.425.000,-	30,78
2	Perawatan tahun 1(P1)	3.835.000,-	18,37
3	Perawatan tahun 2(P2)	5.309.000,-	25,43
4	Perawatan tahun 3(P3)	5.309.000,-	25,43
Jumlah		20.878.400,-	

Sumber : Data primer diolah

Total biaya yang dibutuhkan petani dari penanaman awal sampai pada masa pemeliharaan tahun ke-3 senilai Rp 60.364.349,- seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Biaya kebutuhan peremajaan tanaman sawit milik petani

No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	Penanaman (P0)	17.320.986	29
2.	Pemeliharaan tahun pertama (P1)	13.898.752	23
3.	Pemeliharaan tahun kedua (P2)	15.130.878	25
4.	Pemeliharaan tahun ketiga (P3)	14.013.733	23
Jumlah rata-rata kebutuhan petani		60.364.349	

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan biaya indikatif yang ditetapkan pemerintah senilai Rp 66.437.000, maka selisih nilai rata-rata biaya kebutuhan petani lebih kecil dari yang ditetapkan pemerintah yaitu senilai Rp 5.793.600,- atau 8,7%.

Tabel 12. Perbandingan Biaya Peremajaan Sawit

No	Jenis Kegiatan	*Biaya Pemerintah (Rp)		**Biaya Rata-rata Petani (Rp)	Persentase Selisih (%)
		I	II	II	(II-I)
1.	Penanaman (P0)	23.275.000	17.320.986		25,67
2.	Pemeliharaan tahun pertama (P1)	15.133.000	13.898.752		7,98
3.	Pemeliharaan tahun kedua (P2)	13.339.000	15.130.878		(14,47)
4.	Pemeliharaan tahun ketiga (P3)	14.690.000	14.013.733		3,68
<b>Jumlah Total</b>		<b>66.437.000</b>	<b>60.364.349</b>		<b>8,7</b>

Sumber: (\*) Dirjenbun, 2017

(\*\*) Data Primer diolah

Sesuai dengan tabel diatas bahwa kebutuhan biaya penanaman awal terdapat selisih 25,67% lebih tinggi biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini terjadi akibat adanya biaya yang dibutuhkan oleh petani terhadap pembelian bibit kelapa sawit (lampiran 22), demikian juga untuk biaya pada pemeliharaan tahun-1 sampai dengan tahun ke-3 terdapat selisih masing-masing 7,98%, 14,47% dan 3,68%. Sesuai dengan kebijakan program peremajaan sawit rakyat yang ditetapkan oleh pemerintah melalui BPDPKS yaitu dengan memberikan bantuan senilai Rp 25.000.000,-/ha/petani.

Petani yang tergabung di Gapoktan Aek Raso Maju Bersama harus menyediakan rata-rata dana tambahan/pendamping senilai Rp 35.643.400,- atau 59% dari total biaya yang dibutuhkan, hal ini sangat memberatkan petani sebab petani harus mencari kekurangan dana tersebut melalui lembaga keuangan lain yang memerlukan persyaratan atau jaminan seperti sertifikat lahan dan lainnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data di lokasi penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut Aspek administrasi berdasarkan usia terdapat 68% usia produktif dan 32% lainnya tidak produktif sementara itu 78,8% petani memiliki luas lahan 2 ha dan 21,2% memiliki lahan 4 ha namun hal ini dapat memenuhi ketentuan BPDPKS. Berdasarkan alamat petani terdapat 27,52% yang beralamat diluar daerah lokasi dan 64% belum memiliki legalitas lahan (SHM), sehingga hal ini menjadi kendala petani untuk memperoleh dana bantuan pemerintah senilai Rp 25.000.000,-/ha/petani akibat tidak memenuhi ketentuan kebijakan program PSR melalui BPDPKS. Dana bantuan pemerintah Rp 25.000.000,- tidak dapat memenuhi kebutuhan dari rata-rata biaya peremajaan sawit petani sampai tahap pemeliharaan tanaman tahun ke-3, sehingga petani memerlukan dana pendamping sebesar 59% dari total dana yang dibutuhkan atau Rp 35.364.349/ha/petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Andi, 2016. *Trend Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia*. Jurnal Agraris (Journal of Agribusiness and Rural Development Research) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).  
 Ali, E.S. 2010. *Underplanting:Teknis Peremajaan Sawit Tanpa kehilangan Penghasilan*. JP STIPAP.5(1).

- Bakir, Z dan Manning Chris, 1983, Partisipasi Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, dan Pengangguran di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gajah Mada.
- BPS. 2016. *Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2016*. Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
- BPS. Indonesia 2017. *Statistik Indonesia 2017*. BPS Indonesia Jakarta.
- Dunn,W.N.1988, *Public Policy Analysis: An Introduction*. Second Edition. Prentice Hall. Inc.A.Simon & Schuster Cmpany, Englewood Cliff. New Jersey.
- Farmelia R Hutasoit, Sakti Hutabarat, Didi Muwardi, Februari 2015. *Analisis Persepsi petani kelapa sawit swadaya bersertifikasi RSPO dalam menghadapi Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Ukut Kabupaten Pelalawan*, Jom Paperta Vol 2 No 1 Februari 2015.
- Gunawan Sri, Hartono, Imam Safe'i , 2016. *Standar Operasional Prosedur Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Bebas Deforestasi*, Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia, Agustus 2016
- Hasibuan, Abdul Muis; Nurmalina, Rita; Wahyudi, Agus. 2012. *Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Hilir Kakao (Suatu Pendekatan Sistem Dinamis*. Informatika Pertanian, Vol. 21 No.2, Desember 2012 : 59 – 70. January 15, 2017.
- Haryono, Dede; Soetrisno, Hartandi, Rudi, Aji, Joni Murti Mulyo. 2011. *Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Produksi Kakao di Jawa Timur*. J-SEP Vol 5 No.2 Juli 2011. 375-704-1-SM. Pdf. July 4, 2015. 2016.
- Herman M, Punarwo D, 2011. *Produktivitas Jagung Sebagai Tanaman Sela Pada Peremajaan Sawit Rakyat di Bagas Sapta Permai Riau*. [Laporan Penelitian]. Sukabumi: Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri.
- Herman M, Ferry Y, 2010. Peremajaan Kelapa Sawit. Journal Info Teknologi Perkebunan Vol.2: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 *Tentang Pedoman tanaman kelapa sawit pekebun*. Jakarta Kementerian Pertanian 2017.
- Pahan I. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016- *Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa sawit*. Jakarta 2016.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016- *Tentang Pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit*. Jakarta 2016
- Saragih Bungaran. 2016. *Produktivitas Sumber Pertumbuhan Minyak Sawit yang Berkelanjutan*. Makalah. 2016.
- Siregar,Sofyan.2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekartawi.1988. *Analisis Usaha Tani*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sutarta ES, Ginting EN, Rahutomo S. Santoso H, Susanto A. 2008. *Peremajaan Kelapa sawit Sistem Under Planting, Keunggulan dan Kelemahannya*. Medan (ID): Pusat PEnelitian Kelapa Sawit (PPKS).
- Sutarta ES, Ginting EN, Rahutomo S. Santoso H, Susanto A. 2012. *Peremajaan Kelapa sawit Sistem Under Planting, Keunggulan dan Kelemahannya*. Medan (ID): Pusat PEnelitian Kelapa Sawit (PPKS).
- Taniwiryo, D, 2007. *Hati-hati melakukan 'underplanting di sawit*. Sinar Tani Edisi 10-16 Oktober 2007.